KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Gedung baru DPR lolos
Tanggal : Sabtu, 21 Oktober 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Gedung Baru DPR Lolos

Badan Anggaran dan Pemerintah Alokasikan Rp 601 Miliar

JAKARTA, KOMPAS – Keinginan DPR memiliki gedung baru segera terpenuhi. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR meloloskan anggaran tahap awal pembangunan gedung baru sebesar Rp 601 miliar. Sebaliknya, permintaan serupa dari DPD ditolak sehingga memicu ketidakpuasan.

Anggaran untuk gedung baru DPR akan disahkan dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 pada 26 Oktober mendatang. "(Anggaran DPR) disetujui sepenuhnya sesuai nota keuangan yang diajukan pemerintah," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDI-P Said Abdullah, Jumat (20/10).

DPR mendapatkan pagu anggaran Rp 5,7 triliun untuk 2018, naik dari sebelumnya Rp 4,3 triliun. Meskipun ada kenaikan anggaran Rp 1,4 triliun, sejumlah anggota DPR meminta alokasi dana dan pekerjaan pembangunan gedung baru DPR dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar bisa diawasi.

Untuk tahap awal, mulai 2018, DPR mengalokasikan Rp 601 miliar untuk pengembangan kompleks parlemen. Sebesar Rp 320 miliar di antaranya untuk pembangunan gedung baru DPR. Sisanya untuk pembangunan alun-alun demokrasi. Adapun total anggaran untuk menyelesaikan pembangunan diperkirakan Rp 1,6 triliun (*Kompas*, 18/8).

Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate, mengatakan, anggaran itu untuk tahap awal pembangunan gedung, yakni untuk membayar konsultan dan desain gedung baru DPR. Meski termasuk dalam anggaran DPR, proyek pembangunan akan dilaksanakan Kementerian PUPR.

Johnny mengatakan, pemerintah memang melakukan moratorium pembangunan gedung baru. Namun, karena kemampuan anggaran negara mencukupi dan pembangunan gedung diperlukan, anggaran Rp 601 miliar itu diloloskan.

Sementara itu, usulan pembangunan gedung baru DPD ditolak. "Pagu alokasi anggaran tahun 2018 untuk DPD memang naik Rp 123 miliar dari pagu sementara. Namun, penambahan tersebut tidak untuk gedung. Untuk pembangunan gedung, yang disetujui hanya DPR," ujar Wakil Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga DPD Budiono.

Wakil Ketua DPD Nono Sampono mengatakan, seharusnya semua pihak, termasuk pemerintah dan DPR, memahami bahwa DPD butuh gedung baru. "Semua lembaga negara yang lahir pascareformasi sudah punya gedung, tetapi kami belum. Masak sebuah lembaga negara masih meminjam gedung. Gedung itu penting karena menyangkut eksistensi kelembagaan," ujarnya.

(AGE/APA)